

# KEPENTINGAN THAILAND DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN LEGALISASI GANJA

I Putu Satya Kama <sup>1)</sup>, Anak Agung Ayu Intan Prameswari <sup>2)</sup>, Sukma Sushanti <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [satyakamaa@gmail.com](mailto:satyakamaa@gmail.com) <sup>1)</sup>, [prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com) <sup>2)</sup>, [sukmasushanti@gmail.com](mailto:sukmasushanti@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Thailand was one of the biggest cannabis producing countries in the world in the 80s. After signing the UN regulations on drugs (Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances), Thailand made new regulations and strongly opposed the distribution of cannabis in the country. By implementing a "war on drugs" policy and a "zero tolerance" attitude, Thailand has had a history of the biggest human rights violations in ASEAN related to cannabis. After Thailand became the first country to ban cannabis use, now Thailand has become the first country to legalize marijuana for medical purposes in ASEAN. This study aims to analyze the reasons why the Government of Thailand implemented a policy of legalizing medical marijuana in 2019. Using the National Interest framework through qualitative descriptive analysis, it was found that Thailand issued a policy of legalizing marijuana to meet the economic interests and security interests of the country.*

**Keywords:** *Thailand, War on Drugs, Legalization of Medical Marijuana, National Interest, Economic Security.*

## 1. PENDAHULUAN

Berawal pada tahun 1979, pemerintah Thailand memproklamkan Undang-Undang Pengawasan Narkotika, yang merupakan amanat dari Pemerintah Amerika Serikat melalui *Office of Narcotic Control Board* (ONCB). Amanat inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal masuknya ganja kedalam 108 jenis psikotropika (Narcotics Act 2522, 1979), dan sekaligus membuat kebijakan "*war on drugs*" yang dibuat oleh Amerika Serikat mempengaruhi negara Thailand. Sejak saat itu, pelarangan terhadap budidaya tanaman ganja berlaku di Thailand. Banyak perdebatan yang datang dari para pemimpin Thailand. Perdana Menteri Kriangsak Chanaman pada tahun 1977 sempat mengatakan bahwa "*Ketika ada pasar, niscaya akan selalu ada perdagangan, baik itu secara legal maupun ilegal.*"

Namun, seiring dengan berkembangnya negara tersebut dan pergantian rezim yang berkuasa, membuat kebijakan "*war on drugs*" semakin diperketat pada tahun 1979.

Tujuan Thailand yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej, menerima masuknya kebijakan "*war on drugs*" adalah untuk dapat mengatasi permasalahan *drugs trafficking* yang ada di kawasan *Golden Triangle*. Sebagai salah satu negara yang sangat intens menentang penggunaan obat-obatan terlarang, dimulai dari ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh PBB mengenai Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), Thailand dari tahun ke tahun terus melakukan perlawanan terhadap penggunaan obat terlarang, salah satunya adalah ganja.

Kebijakan pelarangan narkotika oleh Thailand mendapatkan bantuan penuh dari Amerika Serikat (State, 2003). Bantuan tersebut diperoleh dalam bentuk dukungan pendanaan, bantuan pelatihan bagi penegak hukum di Thailand dalam menangani permasalahan obat-obatan terlarang, pelatihan terhadap ahli-ahli yang ada di Thailand, bantuan pendanaan untuk perangkat tentara

kerajaan, polisi perbatasan, dan polisi provinsi di Thailand.

Upaya Thailand dalam mengimplementasikan “*war on drugs*” adalah berupa *Strategy on Drug Supply Reduction, Strategy on Drug Demand Reduction, Strategy on Potential Demand Prevention dan Strategy on Management* (Fawthrop, 2012). Perlawanan terhadap narkoba semakin digalakkan pada tahun 2003. Perdana Menteri Thailand, Thaksin melakukan kerja sama dengan polisi, militer, dan masyarakat untuk bersama-sama melaporkan para pengguna obat-obatan terlarang yang ada di sekitar mereka, dan akan memberikan imbalan terhadap pelapor yang berhasil memberikan informasi kepada negara. Tindakan keras Perdana Menteri Thaksin tersebut terlihat ketika dalam pidatonya, dia dengan terbuka mengajak seluruh polisi, militer, dan masyarakat untuk berperang bersama melawan obat-obatan terlarang. Dalam pidato tersebut dia menyatakan bahwa: *“Untuk melawan obat-obatan terlarang kita memang harus menggunakan tangan besi, karena obat-obatan terlarang sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Jangan ada belas kasihan, karena menjadi kejam terhadap mereka (pelaku obat-obatan terlarang) tidaklah merupakan hal yang buruk, dan jika ada kematian diantara penyelundup, hal itu sangatlah normal”*. (Phongpaichit, 2003)

Dalam perjalanan “*war on drugs*” yang diterapkan, banyak korban yang berjatuhan. Nampaknya kebijakan *War On Drugs* yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin membawa dampak negatif kepada kesejahteraan masyarakat, keamanan dan pembangunan negara. Para petani ganja yang tersebar di pelosok utara Thailand harus kehilangan lahan mereka dan tidak bisa mendapatkan penghasilan dari implementasi kebijakan *war on drugs* (Costs, 2013). Selain itu, tiga bulan setelah pernyataan Thaksin tersebut, ada lebih dari 2.800 korban yang berjatuhan karena kasus ganja, bisa dikatakan hampir ada 30 korban yang berjatuhan setiap harinya. Bahkan banyak dari korban-korban

yang berjatuhan bukan merupakan pengguna ganja ataupun pengedar ganja. Hal tersebut bisa terjadi akibat dari pemalsuan daftar hitam oleh oknum penegak hukum di Thailand.

Alhasil pernyataan tersebut pun mendapat kecaman tajam oleh para pejuang hak asasi manusia yang ada di Thailand, *Human Rights Watch*, bahkan Thailand juga sempat mendapatkan kecaman dari *The U.S State Department* yang mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling buruk yang pernah terjadi di Thailand pada tahun 2004. Namun, Thaksin membalas pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat sebagai “*an annoying friend*” (DrugScope and The Beckley Foundation, 2004).

Berangkat dari kebijakan baru Thailand menyangkut legalisasi ganja yang diresmikan pada tahun 2019 (Forbes, 2018), membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan apa yang dilakukan oleh Thailand sehingga membuat Thailand memutuskan melegalkan ganja di negaranya.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah “Apa kepentingan Pemerintah Thailand dalam menerapkan kebijakan legalisasi ganja pada tahun 2019?”

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan Pemerintah Thailand dalam membuat kebijakan mengenai legalisasi ganja. Selain itu, penulis juga ingin memaparkan analisis keamanan ekonomi terkait kebijakan legalisasi ganja yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua kajian pustaka yang menjadi acuan dan mampu

mendukung argumentasi penulis. Kajian pertama adalah tulisan dari Lana D. Harrison, Michael Backenheimer, dan James A. Inciardi (1995), yang berjudul "Cannabis Use In The United States: Implications For Policy". Dalam tulisannya, Harrison et.al (1995) menjelaskan tentang bagaimana ganja pertama kali digunakan di Amerika Serikat, berikut dengan penyebarannya. Kajian kedua adalah sebuah buku yang ditulis oleh Clayton J. Mosher dan Scott Akins (2019), berjudul "In the Weeds: Demonization, Legalization, and the Evolution of U.S. Marijuana Policy". Literatur kedua membantu penulis melihat tentang reformasi yang dilakukan oleh organisasi, seperti Drug Policy Alliance (DPA), The National Organization For The Reform Of Marijuana Laws (NORML), dan The Marijuana Policy Project (MPP), terhadap tanaman ganja sebagai bahan medis.

### 3. KERANGKA BERPIKIR

#### **Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang sangat lekat dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Konsep ini menjelaskan bahwa seluruh negara yang ada di dunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang nantinya akan mengatur kemana arah langkah kebijakan dan tujuan dari negara tersebut. Beberapa tokoh yang menjelaskan tentang konsep kepentingan nasional adalah Charles Beard, Hans Morgenthau, dan Joseph Frankel.

Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional percaya bahwa negara merupakan aktor yang paling rasional dan independen. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan pernyataan di atas, tentang kebutuhan dan keinginan sebuah negara, kepentingan nasional mampu membuat negara mengeluarkan suatu kebijakan yang paling rasional untuk mempercepat tercapainya keinginan maupun kebutuhan dari negara tersebut. Berikut penjabaran mengenai konsep-

konsep yang ada dalam teori Kepentingan Nasional :

#### a. Kepentingan Keamanan

Kepentingan keamanan merupakan sebuah kepentingan yang membahas tentang bagaimana sebuah negara bisa mendapatkan jaminan keamanan negaranya sendiri atas ancaman dari negara berdaulat lainnya ataupun ancaman dari dalam negaranya sendiri . Selain itu, letak geografis juga bisa mempengaruhi sebuah negara untuk meningkatkan kepentingan keamanannya. Peningkatan kepentingan keamanan yang dimaksud disini adalah bisa berupa penambahan anggaran untuk kebutuhan militer, memperluas aliansi dengan negara yang memiliki kepentingan serupa dan memiliki ancaman yang serupa. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika pada tahun 1960-an, Pemerintah Amerika Serikat merasa sangat terganggu keamanannya karena keputusan yang dibuat oleh Castro untuk mengubah Kuba menjadi negara komunis, namun tidak memiliki kepanikan yang sama ketika hal serupa terjadi di Laos.

Jika berkaitan dengan apa yang terjadi di Thailand, ancaman dari luar batas teritorial negara yang terjadi adalah penyelundupan obat-obatan terlarang yang terjadi pada kawasan Golden Triangle yang dapat membahayakan masyarakat Thailand sendiri. Selain itu, kepentingan keamanan yang diutamakan adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam negerinya sendiri. Seperti yang diketahui, Thailand sempat menjadi negara yang dengan tegas menyatakan akan melakukan apapun untuk memerangi pengguna, pendistribusi, dan pembudidaya tanaman ganja. Dalam implementasi kebijakan *war on drugs*, banyak korban yang berjatuh dan membuat perpolitikan negara Thailand tidak stabil.

#### b. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjamin kesejahteraan negara dalam

hubungannya dengan negara lain. Peningkatan kesejahteraan negara dalam hubungannya dengan negara lain memungkinkan suatu negara bekerja sama dengan negara lain dalam ruang lingkup ekonomi, selama kerja sama tersebut bisa memberikan keuntungan bagi masing-masing negara. Selain itu, kepentingan ekonomi juga bisa berupa peningkatan keamanan ekonomi suatu negara melalui peningkatan ekspor potensi dalam negerinya sendiri. Dalam konsep keamanan ekonomi, sebuah negara dituntut harus ikut andil dalam perekonomian dunia dengan cara turut berpartisipasi dalam perdagangan dunia jika ingin tetap menjaga keamanan perekonomian dalam negeri mereka.

Thailand dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul pada September 2019 lalu, menyatakan bahwa Thailand akan meregulasi kembali peraturan tentang tanaman ganja dan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Thailand untuk ikut menanam ganja di rumah mereka masing-masing, dan bisa menjual hasil panennya kepada pemerintah. Tujuannya adalah agar Thailand bisa memproduksi ganja medis dengan skala yang lebih besar.

#### c. Kepentingan Tatanan Dunia

Kepentingan tata dunia bertujuan untuk memelihara sistem politik internasional, sekaligus menjamin keamanan ekonomi negara dengan negara lainnya. Sehingga hubungan perdagangan diluar batas negara bisa tetap berjalan dengan aman. Konsep "aman" disini adalah pelaku ekonomi yang berasal dari suatu negara bisa dengan damai dan tenang memberikan kontribusinya kedalam ranah ekonomi, walaupun hal tersebut dilakukan di luar batas negaranya sendiri.

#### d. Kepentingan Ideologi

Sedangkan yang terakhir adalah kepentingan ideologi, dimana kepentingan ini bertujuan untuk menjamin nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara di dunia. Ideologi suatu bangsa juga bisa ditentukan oleh sebuah kepentingan. Ketika sebuah negara ingin memperkuat investasi dalam negerinya dan melakukan perlindungan kepada sektor-sektor usaha dalam negeri mereka dengan menolak masuknya investasi asing, bisa membuat sebuah negara mengubah ideologinya. Seperti apa yang terjadi ketika Castro mengubah negara Kuba menjadi negara komunis.

Kepentingan nasional memang tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh suatu negara, karena tentu akan ada kepentingan yang harus dikorbankan dan tidak bisa dicapai dengan maksimal. Namun seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah negara sudah melalui proses yang sangat panjang dan dipertimbangkan yang matang, sehingga sebuah negara masih akan tetap bisa mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dikeluarkannya tersebut, walaupun selalu akan ada aktor-aktor lain yang menentang kebijakan. Dari keempat konsep kepentingan nasional milik Nuechterlein diatas, kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

## 4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Jika mengacu kepada definisinya, penelitian deskriptif adalah merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan interpretasi yang tepat (Syaodih, 2007). Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung terhadap pengaruh dari suatu fenomena dengan lebih menyuguhkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepentingan Pemerintah Thailand Menerapkan Kebijakan Legalisasi Ganja.**

Telah dijelaskan di atas bahwa Thailand memiliki hubungan kerja sama diplomatis yang serius dengan Amerika Serikat. Bahkan menjadi negara pertama di Asia yang memiliki kerja sama tertulis dengan Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Pemerintah Thailand menjadi mitra kerja sama yang baik untuk Amerika memperluas pengaruhnya hingga ke kawasan ASEAN. Sejak Amerika pertama kali menyatakan bahwa ganja sangat berbahaya dan tidak memiliki fungsi medis, Thailand juga menyatakan hal yang serupa walaupun implementasinya masih belum seketat di Amerika Serikat.

Setelah memasukkan ganja kedalam narkotika golongan I, Thailand menjalankan kewajibannya dengan ketat, yaitu dengan menjadi salah satu pendiri organisasi internasional anti narkotika yang ada di ASEAN, yaitu ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) yang dibentuk pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) setelah ratifikasi ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs (Network, 2013). Dengan kewajiban yang harus dijalaninya dalam memberantas pengedaran narkotika jenis apapun, Pemerintah Thailand pada tahun 2003 mengadopsi kebijakan *War On Drugs* dari Amerika Serikat dengan menerapkan *sikap zero tolerance* pada pengimplementasiannya.

Namun sayangnya walaupun sudah bersikap keras kepada pengedar narkotika di negara tersebut, setiap tahunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Bahkan dengan tambahan kasus pelanggaran HAM akibat kebijakan tersebut yang juga berbanding lurus dengan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Alhasil, kecaman dari organisasi internasional dan nasional yang bergerak di bidang HAM menyerang Pemerintah Thailand.

### **Potensi Keuntungan Ekonomi Pada Kebijakan Legalisasi Ganja**

Pasar gelap merupakan musuh utama yang harus dilawan oleh Pemerintah Thailand jika ingin menghentikan peredaran ganja di Thailand. Namun pada faktanya, pasar gelap selalu bisa tumbuh menjadi semakin besar ketika negara tidak bisa mengendalikan permintaan. Permintaan akan kebutuhan ganja sebagai tanaman medis di Thailand cukup tinggi, karena ganja memang sudah dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional sejak dahulu oleh Thailand. Begitu juga dengan permintaan rekreasional dimana para petani yang ada di pelosok-pelosok desa Thailand biasa menggunakan ganja sebagai rokok untuk relaksasi tubuh ketika lelah berladang seharian. Susahnya mendapatkan ganja di Thailand membuat pelaku pasar gelap bisa memberikan harga yang tinggi terhadap tanaman ganja karena resiko yang ditanggung sangatlah besar, oleh karena itu kesempatan untuk pelaku pasar gelap yang menjual ganja bisa memonopoli harga dengan sangat tinggi dan mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Fakta yang terjadi di lapangan ketika pemerintah masih menempatkan ganja sebagai tanaman narkotika adalah banyak kerugian yang dialami oleh negara. Salah satunya adalah biaya anggaran yang sangat tinggi untuk terus melakukan investigasi, penangkapan, perlindungan terhadap penegak hukum, termasuk juga biaya untuk merawat para pengguna ganja ketika dimasukkan kedalam sel tahanan (Costs, 2013). Pemerintah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menghentikan peredaran ganja, namun pasar gelap semakin besar menghasilkan keuntungan dari hal tersebut karena masih banyaknya permintaan oleh masyarakat. Adair Turner, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Inggris pada tahun 2003 sempat mengatakan bahwa jika negara ingin membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara dimana narkotika banyak memiliki pasar seperti Colombia dan Afghanistan, negara

memang harus meliberalisasi penggunaan narkoba di masyarakat, memerangi penyalahgunaan dengan pendidikan, dan bukan dengan larangan, apalagi melancarkan perang melawan narkoba yang tidak mudah untuk dimenangkan dan hanya bisa mengkriminalisasi masyarakat (Costs, 2013). Yang dimaksud dengan potensi keuntungan ekonomi dalam bab ini adalah negara tidak harus mengeluarkan banyak anggaran untuk melakukan perang terhadap pengguna ganja dan juga sekaligus bisa memanfaatkan pajak yang didapatkan oleh negara dalam setiap transaksi tanaman ganja yang keuntungannya sangat besar.

Melalui sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh Professor Dr. Sangsit Piriyanan, Dr. Chatwaran Ongsingnidawan, Dr. Churirat Chareonporn dari Universitas Rajabhat yang disajikan untuk Kantor Sekretaris Permanen untuk Keadilan pada tahun 2016 disampaikan bahwa peningkatan anggaran yang dilakukan oleh Thailand selama perang melawan narkoba sangatlah besar. Berikut merupakan data yang disampaikan dalam penelitian tersebut berkaitan dengan jumlah anggaran penanganan narkoba di Thailand pada tahun 1999 – 2001.

ปี 2542 - 2544	2542	2543	2544
มาตรการผสมผสาน	68,307,700	167,800,400	198,224,000
บริหารจัดการ	136,161,800	138,908,900	139,358,900
ควบคุมพืชเสพติด	12,917,900	12,238,800	5,715,800
รวม	217,387,400	318,948,100	343,298,700

Melalui gambar diatas, dapat diketahui bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 1999 hanya sebesar 217.387.400 bath, kemudian meningkat pada tahun 2000 menjadi sebesar 318.948.100 bath, dan meningkat lagi pada tahun 2001 menjadi 343.298.700 bath. Melalui tahun-tahun tersebut terlihat bahwa Thailand memiliki upaya yang sangat serius dalam melawan penyalahgunaan narkoba, namun hal tersebut juga sekaligus menjadi indikator peningkatan jumlah kasus terkait narkoba yang ada di Thailand.

Gambar berikut akan memperlihatkan peningkatan signifikan jumlah anggaran penanganan narkoba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Thailand pada tahun 2002 – 2016.

(หน่วย: ล้านบาท)								
2545 - 2552	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552
ป้องกัน	1,142,457,700	1,264,419,100	1,561,132,800	434,352,100	1,534,684,700	1,555,132,600	1,591,643,800	1,694,208,200
ปราบปราม	996,424,700	1,147,369,300	1,317,689,700	414,429,600	1,356,688,900	1,489,852,300	1,876,253,800	1,687,497,700
บำบัด	1,391,532,000	1,808,504,200	1,664,957,300	30,872,500	800,449,200	971,940,700	1,111,404,800	1,436,144,200
รวม	3,528,414,600	4,220,292,800	4,543,779,800	879,654,200	3,691,842,800	4,016,925,600	4,579,302,400	4,817,850,100

(หน่วย: ล้านบาท)							
2553 - 2559	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
ป้องกัน	1,320,876,140	1,425,529,300	4,647,742,400	4,923,287,700	4,704,544,308	2,292,340,890	3,584,920,000
ปราบปราม	1,993,490,620	1,934,017,300	2,631,050,200	3,623,563,100	3,333,678,052	2,990,354,157	3,333,554,000
บำบัด	1,590,560,740	1,581,029,800	2,176,166,700	2,741,344,500	2,522,036,940	3,545,271,180	3,766,769,300
รวม	4,904,927,500	4,940,576,400	9,454,959,300	11,288,195,300	10,560,259,300	8,827,966,227	10,685,243,300

Sejak tahun 2002, klasifikasi jumlah anggaran untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah anggaran pencegahan, anggaran penanganan, dan anggaran pengobatan. Melalui akumulasi ketiga klasifikasi anggaran tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat besar untuk anggaran penyalahgunaan narkoba di negara tersebut. Sejak tahun 2002 hingga 2016 anggaran telah meningkat dari 3.52.414.600 bath menjadi 10.685.243.300 bath atau sejumlah USD 339.156.268,69. Jumlah pengeluaran anggaran untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada tahun 1999-2016, jika diakumulasikan bisa mencapai angka 92.000 juta bath dan angka tersebut tidaklah sedikit jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Thailand dalam segala kebijakannya menangani masalah narkoba. Menjadi sebuah pertanyaan besar kepada negara, apakah sebenarnya upaya Pemerintah Thailand dalam memerangi narkoba di negara tersebut menjadi sia-sia, karena hanya akan terus menghabiskan anggaran yang sangat besar. Jika negara harus terus mengeluarkan anggaran yang sangat besar dalam memerangi permasalahan narkoba di Thailand, negara bisa saja menghabiskan setengah total anggaran belanja mereka khusus untuk memerangi narkoba dengan mengesampingkan ketahanan ekonominya. Karena selain anggaran untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, pemerintah juga harus memikirkan biaya

perawatan narapidana yang ada di Thailand. Sedangkan yang terjadi di Thailand adalah hampir 70% penjara di Thailand dipenuhi oleh narapidana dengan tindak pelanggaran narkotika.

Dalam sebuah tulisan karya Sam Levin (2016), disebutkan bahwa di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang masih belum mengizinkan pemanfaatan ganja sebagai bahan medis, ada sekitar empat ratus keluarga yang pindah ke negara bagian Colorado hanya untuk bisa mendapatkan terapi Cannabinoid (CBD), yaitu salah satu zat yang ada pada kandungan ganja untuk mengobati penyakit yang diderita oleh keluarga mereka, dan fenomena tersebut disebut sebagai “migrasi ganja medis internasional” (Levin, 2016). Belajar dari fenomena tersebut, maka tidak akan mustahil jika banyak masyarakat di negara-negara anggota ASEAN yang memiliki penyakit dengan memerlukan pengobatan ganja akan pergi ke Thailand hanya untuk melakukan terapi obat dari ganja. Melalui kemungkinan tersebut juga akan muncul lagi keuntungan ekonomi yang berpotensi didapatkan oleh negara Thailand, mengingat banyak masyarakat di negara-negara ASEAN yang menderita penyakit yang memerlukan penanganan ganja sebagai alternatif medisnya, seperti kanker, epilepsi, dan HIV/AIDS.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, penggunaan ganja medis mampu memberikan keuntungan ekonomi kepada negara, karena negara tidak harus mengeluarkan anggaran untuk perang melawan penyebaran ganja di negara mereka, begitu juga dengan anggaran kesehatan yang ada di Thailand.

Seperti contoh pada tahun 2013, program ganja medis mampu menyelamatkan keseluruhan anggaran kesehatan Amerika Serikat pada Medicare hingga \$165 juta (Bradford and Bradford, 2016). Selanjutnya, pada tahun 2014, penghematan biaya anggaran asuransi kesehatan Amerika Serikat mencapai angka \$1,1 miliar karena penggunaan ganja medis. Penghematan tersebut berasal dari penurunan penggunaan obat

antinausea hingga 17%, antidepresan 13%, kejang dan psikosis 12%, dan penghilang rasa sakit atau pain killer hingga 11%. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuyan Shi (2017) “Medical Marijuana Policies and Hospitalizations Related to Marijuana and Opioid Pain Reliever” dengan fokus pada tingkat rawat inap akibat ketergantungan obat resep Opioid pada tahun 1997-2014 bisa mengalami penurunan hingga 23% dalam kasus rawat inap, dan 13% dalam kasus ketergantungan/penyalahgunaan Opioid dengan menggunakan ganja medis sebagai penggantinya (Shi, 2017). Oleh studi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinan anggaran asuransi kesehatan negara Thailand akan terbantu dengan diizinkannya penggunaan ganja sebagai bahan medis.

Sebuah teori ekonomi yang dipercaya oleh Adam Smith sebagai bapak ekonomi dalam karyanya “*The Wealth of Nations*” (1776, IV.2.15), mengatakan bahwa negara memerlukan sebuah spesialisasi jika ingin bersaing dan bertahan dalam perekonomian dunia. Keuntungan alami yang dimiliki oleh sebuah negara dari sebuah komoditas tentu kadang-kadang begitu besar, sehingga akan sia-sia jika melawannya dan tidak memanfaatkannya. Begitu juga dengan potensi ganja yang dimiliki oleh Thailand. Jika jumlah pasar ganja global seperti yang diprediksi oleh Grand View Research akan terus meningkat, dan Thailand mampu memproduksi ganja dengan kualitas yang baik dengan cepat dan mudah, maka Thailand akan dengan mudah bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Jim Plamondon, seorang Wakil Presiden Pemasaran pada perusahaan ganja pertama di Thailand, yaitu Thailand Cannabis Cooperation juga memiliki pandangan yang positif tentang keuntungan ganja Thailand yang segera akan merajai pasar global (Quinley, 2018).

### **Keuntungan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Ganja Medis**

Penggunaan medis ganja di Thailand memang sudah secara resmi diakui oleh Pemerintah Thailand, namun tidak untuk kepentingan rekreasi. Ganja sebagai tanaman medis sudah digunakan sebagai obat selama 5.000 tahun, dan banyak tulisan yang diterbitkan pada tahun 1840 hingga 1900 yang membahas tentang penggunaan ganja sebagai tanaman medis. Begitu juga di Thailand, bahkan penggunaan ganja sebagai kebutuhan medis dilakukan secara tradisional (Maguire, 2018).

Professor Emeritus Psikiatri dari Universitas Harvard menyatakan bahwa pada abad ke-19, dokter lebih tahu banyak tentang ganja, dan pada tahun 1800-an diantara kegunaan lainnya, ganja direkomendasikan sebagai penambah nafsu makan, pelemas otot, obat penenang analgesik, antikonvulsan, dan bahkan sebagai pengobatan untuk kecanduan opium (Mosher and Atkins, 2019). Bahkan selama periode tersebut, perusahaan-perusahaan farmasi besar yang berbasis di Amerika Serikat seperti Lilly, Bristol Meyers Squibb Company, Burroughs Wellcome di Inggris, Merck Company di Darmstadt, Jerman dan Parke-Davis menghasilkan banyak produk medis berbasis ganja (Mosher and Atkins, 2007).

National Institutes of Health (NIH) dan Institute of Medicine pada akhir tahun 1990-an telah memberikan bukti dan mengakui bahwa ganja memiliki kegunaan klinis (Mosher and Atkins, 2019). Namun organisasi besar narkotika dunia yaitu UNODC masih belum bisa mengatakan bahwa ganja bisa dimanfaatkan sebagai bahan medis dan membuat negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan untuk menyatakan ganja hanya bisa memberikan zat adiktif tanpa bisa digunakan sebagai bahan medis.

Ganja dinyatakan tidak lebih berbahaya dari bahan obat kimia lainnya karena efek samping yang dikeluarkan oleh ganja masih bisa ditoleransi dalam tubuh manusia dan semuanya masih bersifat alami, berbeda dengan obat kimia

yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia tertentu sebagai efek sampingnya. Namun, seperti yang sudah dikatakan diatas, laporan tersebut hanyalah merupakan kumpulan testimoni banyak orang mengenai dampak medis ganja, hal tersebut dikatakan belum cukup karena hanya bisa menjadi sebuah rekomendasi lepas, bukanlah hasil dari sebuah penelitian. Pada tahun 2018, Pemerintah Thailand kemudian memberikan kesempatan kepada universitas dan ahli kesehatan yang ada di Thailand untuk membuktikan kebenaran tersebut, dengan dukungan pemerintah untuk memberikan izin penelitian, maka terbukti bahwa ganja bisa dimanfaatkan sebagai bahan medis dan kemudian membuat Thailand pada awal tahun 2019 melegalkan ganja untuk kepentingan medis.

Sama seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990-an, dimana banyak organisasi yang mendukung penggunaan ganja medis seperti Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika, Federasi Ilmuwan Amerika, Asosiasi Dokter untuk Perawatan AIDS, Asosiasi Limfoma Amerika, dan Asosiasi Jaksa Nasional dan Pengacara Pertahanan Pidana (Zimmer) mengedukasi masyarakat Amerika dengan mengatakan bahwa ganja bisa digunakan sebagai bahan medis dengan menerbitkan artikel-artikel positif tentang ganja, banyak organisasi pro-ganja medis di Thailand juga melakukan hal serupa hingga masyarakat yang sebelumnya tabu menganggap ganja hanya bagian dari psikotropika mengubah pola pikir mereka. Jerome Kassier dalam sebuah tulisannya di *The New England Journal of Medicine (NEJM)* mengatakan bahwa kebijakan ganja federal yang melarang pasien meringankan penderitaan dengan meresepkan ganja untuk pasien adalah sebuah kesalahan, berat tangan, dan tidak manusiawi. Melarang penggunaan ganja dianggap tindakan yang sangat munafik karena dokter juga meresepkan morfin dan meperidine untuk meredakan dispnea dan rasa sakit (Gerber, 2004).



National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kumpulan penelitian mengenai pemanfaatan ganja sebagai bahan medis. Dalam kesimpulannya, bahwa benar ganja efektif sebagai bantuan tidur untuk orang-orang dengan masalah tidur seperti sleep apnea, fibromyalgia, dan multiple sclerosis, begitu juga dengan penambah nafsu makan untuk penderita HIV/AIDS, mengurangi gejala Tourette, membantu meringankan kecemasan sosial, dan memberikan hasil yang lebih baik kepada cedera otak traumatis atau pendarahan intracranial (Mosher and Atkins, 2019).

Dalam kasus kanker, penggunaan ganja bisa sangat efektif untuk menghilangkan rasa mual dan muntah terkait penurunan berat badan pasca kemoterapi. Sebagai kasus, di Amerika Serikat ratusan ribu orang disana menjalani kemoterapi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat hingga 15,5 juta penderita kanker di Amerika Serikat (Society, 2017), dan penelitian sudah menyatakan bahwa 70% dari mereka mengalami mual dan muntah pasca kemoterapi, dengan 40%nya memberikan respon buruk terhadap penggunaan obat Antiemetic standar, sedangkan penggunaan Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan salah satu kandungan dalam ganja memiliki efek yang positif terhadap tubuh untuk mengatasi mual dan muntah pasca kemoterapi (National Academies of Sciences, 2017). Jika kembali ke Thailand, banyak penderita kanker yang ada di negara tersebut. Berikut akan ditampilkan data statistik penderita kanker pada tahun 2018 di Thailand.

Summary statistic 2018			
	Males	Females	Both sexes
Population	33 713 602	35 469 573	69 183 175
Number of new cancer cases	84 916	85 579	170 495
Age-standardized incidence rate (World)	169.3	151.0	158.2
Risk of developing cancer before the age of 75 years (%)	17.6	15.3	16.3
Number of cancer deaths	64 074	50 125	114 199
Age-standardized mortality rate (World)	127.4	86.4	104.8
Risk of dying from cancer before the age of 75 years (%)	13.6	9.3	11.3
5-year prevalent cases	136 301	194 415	330 716
Top 5 most frequent cancers excluding non-melanoma skin cancer (ranked by cases)	Liver Lung Colorectum Prostate Gallbladder	Breast Cervix uteri Colorectum Lung Liver	Lung Liver Breast Colorectum Gallbladder

Dengan jumlah penderita kanker sebanyak itu setiap tahunnya di Thailand,

membuat Anutin Charnvirakul yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand memiliki pandangan yang positif terhadap pemanfaatan ganja sebagai bahan medis terutama untuk mengobati penyakit yang banyak diderita oleh masyarakatnya sendiri. Karena dengan melegalisasi ganja untuk kepentingan medis, dia yakin bahwa masyarakat akan bisa mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau, karena obat yang diproduksi merupakan produk dari dalam negeri.

Syndrome Dravet dan Epilepsi adalah salah satu penyakit yang juga banyak diderita oleh penduduk Thailand. Penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang biasanya diderita oleh bayi sejak tahun pertama kehidupannya dan mampu memberikan implikasi yang serius terhadap fungsi tubuh lainnya. Di Amerika Serikat sendiri ada 2,57 juta orang yang mengidap penyakit ini dan sekitar sepertiga orang dengan epilepsi akan terus mengalami kejang meskipun sedang menjalani perawatan medis (National Academies of Sciences, 2017). Di Amerika dan Thailand, 15% hingga 20% dari kasus yang ada dan kebanyakan anak-anak bisa mengalami kematian secara mendadak, kejang berkepanjangan, dan kecelakaan serta infeksi terkait kejang yang diidap tersebut. Sebuah Studi yang dilakukan oleh NEJM pada tahun 2017 dengan didanai oleh perusahaan Inggris GW Pharmaceuticals terhadap 120 anak-anak dan orang dewasa dengan penyakit tersebut diberikan Cannabinoid (CBD) dan membandingkannya dengan teknik pengobatan Placebo terbukti memberikan hasil keefektifan ganja. Jumlah kejang yang menurun dalam pengobatan ganja mencapai 5,9% dari 12,4% perbulan, sedangkan Placebo hanya berkurang hingga 14,1% dari 14,9% perbulan (In The Weed, 2019).

## Peningkatan Kesejahteraan Manusia Pasca Kegagalan “War On Drugs”.

Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa pelarangan NAPZA adalah merupakan

penyebab utama terjadinya dampak buruk yang membahayakan individu, komunitas dan bangsa, sehingga perlu digantikan dengan pengendalian dan regulasi pemerintah yang efektif, adil dan berperikemanusiaan (Rolles and Murkin, 2013).

War on Drugs adalah sebuah program yang sempat diterapkan oleh pemerintah Thailand dalam upayanya untuk melawan penyebaran dan penyalahgunaan seluruh jenis-jenis narkotika di negara mereka. Program perang melawan narkoba tersebut pertama kali dicetuskan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1970an yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Nixon. Program tersebut kemudian meluas dan diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat di seluruh negara bagian federal Amerika Serikat.

Banyak penelitian, organisasi internasional terutama yang berhubungan dengan hak asasi manusia menyatakan bahwa kebijakan War on Drugs ketika pertama kali diterapkan di Amerika Serikat tidak akan bisa berhasil, karena banyaknya permintaan yang ada pada masyarakat. Namun, mengetahui kegagalan War on Drugs tersebut memberikan pertanyaan mengapa Thailand kemudian menerapkan kebijakan tersebut pada tahun 2003. Hal tersebut tidak lain terjadi karena hubungan kerja sama Thailand dengan Amerika Serikat yang sangat erat. Terbukti ketika perang Indo-China yang terletak di Vietnam, Pemerintah Amerika Serikat bersama dengan pasukan militernya menjadikan Thailand sebagai basecamp atau yang juga disebut sebagai pangkalan militer untuk perang tersebut. kerja sama pangkalan militer tersebut hanya menjadi salah satu kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Thailand. Faktanya, Amerika Serikat dengan Thailand sudah memiliki hubungan diplomasi sejak tahun 1818 (The White House, 2008). Bahkan Thailand yang pada saat itu masih bernama Siam menjadi negara pertama di Asia yang memiliki hubungan diplomatik formal dengan Amerika Serikat, jauh sebelum China dan Jepang. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak program yang diterapkan di Amerika Serikat,

kemudian diterapkan juga di Thailand termasuk kebijakan War on Drugs yang menjadi pembahasan pada sub-bab ini.

Seperti yang diketahui, hubungan masyarakat Thailand dengan tanaman ganja memiliki sejarah yang panjang. Banyak pengobatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan bagian utara Thailand memanfaatkan ganja sebagai bahan utama pengobatan tersebut. Sejak ganja masuk ke dalam golongan IV psikotropika di Thailand, pengobatan dengan menggunakan ganja medis semakin sulit dilakukan. Bahkan banyak diantara komunitas masyarakat petani ganja yang dahulu mendapatkan penghasilan melalui pertanian ganja kehilangan penghasilan mereka dan lahan mereka. Terlebih lagi ketika kebijakan War on Drugs diterapkan, banyak masyarakat lansia yang memang biasa menggunakan ganja sejak dahulu sebagai bahan pengobatan tradisional dan masakan harus berhenti memanfaatkan tanaman ganja dalam kehidupan mereka.

Kesejahteraan yang dimaksud dalam bab ini adalah keamanan ekonomi, kesehatan, dan individu. Keamanan ekonomi merupakan aspek keamanan yang paling krusial yang harus dijamin oleh sebuah negara untuk tetap menjamin keamanan nasional negaranya. Hal tersebut merujuk kepada Sheila R. Ronis dalam pengantar buku "Economic Security: Neglected Dimension of National Security?" (Ronis, 2011). Karena melalui keamanan ekonomi pada masyarakatnya, kesejahteraan sebuah negara bisa terjamin. Thailand mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar terhadap petani-petani di Thailand jika menerapkan kebijakan legalisasi ganja untuk penggunaan medis tanpa harus membuat petani-petani tersebut merasa terancam dengan kebijakan War on Drugs yang pernah diterapkan. Jika merujuk kembali kepada sejarah ganja yang ada di Thailand. Thailand memiliki jumlah ladang ganja yang cukup besar, bahkan jumlah panen ganja yang dimiliki oleh Thailand mampu memenuhi kebutuhan pengguna

ganja hampir di setengah dunia. Karena potensi kepemilikan ladang ganja yang bisa tumbuh dimana saja dengan mudah, bahkan dengan kualitas yang tinggi membuat banyak petani di Thailand melakukan cocok tanam ganja. Bisa disimpulkan bahwa melalui industri pertanian ganja tersebut, banyak petani yang bisa sejahtera.

Ketika Thailand masih menyatakan perang melawan narkoba, banyak ancaman terhadap individu yang dirasakan oleh masyarakat Thailand, terutama mereka yang menggunakan ganja untuk alasan medis dan ketenangan. Melalui pelarangan tersebut juga terbentuk banyak pasar gelap yang secara bertahap berkembang menjadi semakin kuat. Disisi lain, banyak masyarakat Thailand yang tinggal diperbatasan Golden Triangle dan berstatus pengangguran dimanfaatkan oleh para oknum pelaku pasar gelap untuk menyelundupkan ganja keluar negara Thailand, sehingga ancaman individu berikutnya juga terbentuk karena upaya pemerintah dalam penggunaan ganja di dalam negerinya. Jika Pemerintah Thailand sekarang melegalkan ganja, maka kemungkinan penyelundupan ganja keluar negeri menjadi berkurang, karena untuk keamanan dan tetap mendapatkan penghasilan, pengangguran yang berpotensi dimanfaatkan untuk menjadi pelaku Drugs Trafficking akan memilih jalur aman dan legal untuk tetap bekerja, karena ada jaminan keamanan dari pemerintah untuk hal tersebut. Selain itu, kekerasan individu oleh petugas keamanan bisa berkurang karena undang-undang sudah memperbolehkan tanaman ganja untuk dimanfaatkan oleh negara sebagai bahan medis.

Berikunya adalah aspek kesehatan, dimana seperti yang kita ketahui pemanfaatan tanaman ganja selalu dimulai dengan penelitian yang menyatakan bahwa ganja memiliki khasiat medis. Begitu juga dengan Pemerintah Thailand yang bisa dengan mudah memberikan akses kepada mereka yang memiliki penyakit dan memerlukan tanaman ganja untuk alternatif pengobatan mereka. Seperti yang sudah

dikatakan oleh Penasehat Menteri Kesehatan Thailand, Dr. Ananchai Asawamekhin pemerintah bisa mengkalkulasikan keringanan biaya yang ditanggung oleh masyarakat mereka dengan penyakit khusus yang memerlukan ganja sebagai obatnya jika dibandingkan dengan harus menggunakan ganja medis dari luar negeri. Bahkan Pemerintah Thailand juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin membudidayakan tanaman ganja dengan batas yang telah disepakati untuk hanya menggunakan tanaman tersebut sebagai obat tradisional rumahan.

### **Kepentingan Keamanan Melalui Pengendalian Drugs-Trafficking Pada Kawasan Golden Triangle**

Golden Triangle adalah sebuah nama yang disematkan oleh komunitas internasional terhadap kawasan perbatasan antara negara Thailand, Myanmar dan Laos dengan potensi kekayaan emas yang bisa dimanfaatkan dalam kawasan tersebut. Emas yang dimaksud disini bukanlah emas secara harfiah, namun emas hitam yang juga menjadi nama lain untuk salah satu jenis narkoba yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yaitu Opium (UNODC, 2015). Golden Triangle sejak dahulu memang sudah digunakan sebagai jalur perdagangan antara negara Thailand, Myanmar dan Laos dengan China, dan komoditas utama yang digunakan sebagai perdagangan dahulu adalah teh, giok, dan jati. Sungai yang menghubungkan jalur perdagangan dalam kawasan Golden Triangle tersebut adalah sungai Ruak dan sungai Mekong. Namun, ketika pada tahun 1980-an kawasan tersebut berubah menjadi kawasan yang digunakan sebagai produksi untuk bahan obat bius, yaitu bunga poppy yang ekstraknya sekarang dikenal dengan nama Opium dan biasa digunakan sebagai obat bius yang kemudian diekspor ke China.



Selain sebagai kawasan budidaya bunga poppy dan perdagangan Opium ke China, kawasan Golden Triangle juga dipercaya digunakan sebagai jalur Drugs Trafficking berbagai macam jenis narkotika di regional ASEAN. Perjalanan penyelundupan narkotika pada Golden Triangle biasanya melalui penyelundupan manusia atau yang juga kita kenal dengan Human Trafficking. Pemerintah Thailand pada tahun 2013 bersama dengan pemerintah Myanmar, Laos dan China sempat bekerjasama untuk bersama-sama berkomitmen menghentikan perdagangan gelap narkotika pada kawasan Golden Triangle dan menamai program tersebut dengan Safe Mekong Operation Project (SMOP) dan pada tahun 2015 semakin memperluas program tersebut dengan mengajak Pemerintah Vietnam dan Kamboja untuk bekerja sama menangani permasalahan Drugs Trafficking untuk melindungi kawasan regional ASEAN dari perdagangan gelap narkotika (Kanato et al., 2017), namun tetap saja peningkatan perdagangan narkotika yang terjadi pada kawasan tersebut masih terjadi, bahkan perdagangan narkotika melalui kawasan tersebut semakin meluas hingga ke Australia, Selandia Baru dan negara-negara di Benua Asia lainnya seperti Jepang. Melalui Konferensi Strategi Obat-obatan Australia ke-7, Perwakilan Regional UNODC mengajak negara-negara terkait untuk bekerja sama memperkuat kapasitas manajemen perbatasan ASEAN untuk melawan peredaran narkotika dan kejahatan transnasional terorganisir melalui jaringan perhubungan perbatasan atau

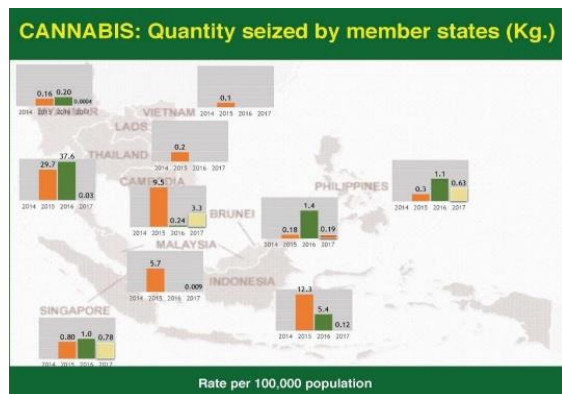
Border Laisson Officer (BLO) dengan menerapkan program Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting, and Trends (SMART) dengan mengembangkan kapasitas negara-negara anggota untuk menangani permasalahan Drugs Trafficking tersebut (UNODC, 2015). Program tersebut melibatkan hampir 600 perwakilan mulai dari para pemimpin kebijakan, polisi, petugas bea cukai, penyedia kesehatan, analisis kebijakan dan akademisi yang berasal dari negara-negara anggota.

Walaupun telah bekerja sama dan memperkuat kapasitas untuk menghentikan perdagangan gelap narkotika, di negara Thailand peningkatan perdagangan gelap narkotika tetap memiliki pasar yang tinggi dan lagi-lagi seluruh pasokan narkotika tersebut tetap didominasi oleh jalur Golden Triangle. Oleh sebab itu pemerintah Thailand juga mengatakan bahwa perdagangan gelap narkotika tersebut tidak akan bisa dihentikan karena itu adalah pasar, dan selama masih ada pasar apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan bisa menghentikannya, namun yang menjadi solusi adalah mengendalikannya atau meregulasi ulang kebijakan terkait. Kebijakan "legalisasi" ganja oleh Pemerintah Thailand atau juga dikenal dengan "regulasi legal" seperti yang dikatakan oleh sebuah organisasi internasional yaitu Transform Drugs Policy Foundation dalam kajiannya Getting Drugs Under Control menjadi salah satu standing point penulis untuk menganalisis upaya pengendalian Drugs Trafficking pada kawasan Golden Triangle yang berusaha dilakukan oleh Pemerintah Thailand terutama untuk keselamatan masyarakat dan kedaulatan negara Thailand itu sendiri.

Hornet nest adalah sebuah istilah strategi yang digunakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mengendalikan kriminalisasi terorisme yang ada di beberapa negara dengan potensi terorisme yang besar. Strategi tersebut mengarahkan kelompok kriminalisasi teroris yang banyak tersebar pada suatu kawasan bisa berkumpul

kepada satu titik, dengan tidak menghentikan organisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan peluang pemerintah dalam meningkatkan power untuk mengontrol kelompok teroris tersebut dan mempermudah pemerintah untuk mengendalikan mereka karena sudah terpusat pada satu titik, dalam arti lain adalah satu kelompok besar. Strategi ini sangat relevan jika dikaitkan dengan strategi yang berusaha dilakukan oleh Pemerintah Thailand untuk mengontrol kartel-kartel dan produsen narkotika pada kawasan Golden Triangle.

Dari permasalahan Drugs Trafficking yang terjadi pada kawasan Golden Triangle, ganja menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam permasalahan Drugs Trafficking tersebut. Lebih dari 20.000 kasus pelanggaran dan penyalahgunaan ganja yang ada di ASEAN dengan total 500 metrik ton ganja yang disita pada tahun 2017 (Kanato et al., 2017), hal tersebut bisa terjadi dan semakin diperburuk karena adanya kawasan Golden Triangle yang memang dikenal sebagai kawasan dengan potensi perdagangan narkotika yang sangat besar.



Oleh sebab itu, kebijakan legalisasi ganja yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand bisa berpotensi besar untuk menyumbangkan sebagian besar pengendalian kasus Drugs Trafficking, secara khusus ganja yang terjadi pada kawasan Golden Triangle.

Berikut adalah gambar pemetaan yang dirilis oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Synthetic Drugs in ASEAN : Trends and Patterns of Amphetamine-type

Stimulants and New Psychoactive Substances terkait dengan penyebaran narkotika yang berasal dari negara produsen ganja pada kawasan Golden Triangle yaitu Thailand, Myanmar dan Laos.

Gambar 1.5 Peta Perjalanan Peredaran Ganja pada kawasan Golden Triangle



Sumber : UNODC (2019)

Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa Myanmar, Laos, dan Thailand menjadi pusat dimana jalur perdagangan ganja dunia terjadi, sebelum mengarah ke China dan perdagangan tersebut tersebar ke seluruh dunia. Jika Pemerintah Thailand mampu mengendalikan perdagangan tersebut, maka permasalahan Drugs Trafficking yang terjadi dalam kawasan Golden Triangle yang melibatkan keselamatan warga negara mereka bisa dikendalikan.

## 6. KESIMPULAN

Setelah memasukkan ganja ke dalam narkotika golongan I, Thailand menjalankan kewajibannya dengan ketat, yaitu dengan menjadi salah satu pendiri organisasi internasional anti narkotika yang ada di ASEAN yaitu ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) yang dibentuk pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) setelah ratifikasi ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs (Network, 2013). Dengan kewajiban yang harus dijalaninya dalam memberantas peredaran narkotika jenis apapun, Pemerintah Thailand pada tahun 2003

mengadopsi kebijakan “war on drugs” dari Amerika Serikat dengan menerapkan sikap “zero tolerance” pada pengimplementasiannya. Namun sayangnya walaupun sudah bersikap keras kepada pengedar narkotika di negara tersebut, setiap tahunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat.

Sebagai negara yang terletak pada kawasan Golden Triangle, Thailand merupakan negara dengan potensi pelaku Drugs Trafficking yang cukup besar. Hal tersebut terjadi karena sejak krisis ekonomi Asia yang diawali dari Thailand yaitu pada tahun 1997, memberikan efek yang besar kepada perekonomian masyarakat di Thailand. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka dan tidak tahu bagaimana mencari mata pencaharian lainnya. Sejak saat itu, banyak pelaku penyelundupan narkotika pada kawasan Golden Triangle berasal dari Thailand. Menjadi pelaku Drugs Trafficking tentunya memiliki resiko kematian yang cukup tinggi karena langkah tersebut merupakan langkah yang ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Thailand. Oleh sebab itu, legalisasi ganja di Thailand akan memberikan sumber pekerjaan baru kepada mereka yang sudah menjadi pelaku Drugs Trafficking untuk bekerja secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan lebih aman. Mengurangi pelaku penyelundupan obat berarti juga mengurangi jumlah pasar gelap yang masuk kedalam negara Thailand.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan legalisasi ganja medis di Thailand merupakan sebuah kepentingan nasional negara Thailand untuk mempertahankan keamanan ekonomi mereka melalui potensi keuntungan ekonomi yang akan didapatkan oleh Thailand terkait dengan industri ganja dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya anggaran perang melawan narkotika dan anggaran terhadap asuransi kesehatan yang mampu dihemat oleh negara Thailand, potensi pajak yang masuk ke dalam negeri, dan keuntungan terhadap penarikan daya wisata ganja medis di Thailand.

Selain itu, kebijakan legalisasi ganja mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Thailand khususnya para kelompok petani ganja dan para pasien penyakit yang memerlukan ganja sebagai alternatif pengobatan mereka. Karena melalui izin ganja medis, banyak pasien yang bisa menghemat biaya yang mereka keluarkan terhadap penyakit yang mereka derita. Berikutnya, upaya Pemerintah Thailand dalam melegalisasi ganja bisa memberikan alternatif lain kepada masyarakat Thailand yang memiliki ketergantungan akan narkotika jenis lain yang lebih berbahaya dari ganja seperti Opium dan Heroin. Walaupun pemerintah Thailand telah memberikan toleransi kepada pemanfaatan ganja, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan awasi oleh pemerintah Thailand, berikutnya akan dijelaskan pada sub bab di bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

2013. *International Narcotics Control Board (INCB)* [Online]. Available: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/drogas/jife.html> [Accessed].
- ADMINISTRATION), D. D. E. 2005. Biro Kontrol Cannabis.
- ALLIANCE, D. P. 2013. New Era: Colorado Embarks on Implementation of Historic Marijuana Legalization Law.
- AROONSRIMORAKOT, S., LAIPHRAKHAM, M. & METADILOGKUL, O. 2019. Social, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailand. *Journal of Thai Interdisciplinary Research*, 14, 43-50.
- ASAWAMEKHIN, D. A. 2019. Kebijakan dan Petunjuk Ganja Medis.
- BACHHUBER, M. A., SALONER, B., CUNNINGHAM, C. O. & BARRY, C. L. 2014. Medical cannabis laws and opioid analgesic overdose mortality in the United States, 1999-2010. *JAMA internal medicine*, 174, 1668-1673.
- BLAIR, E. 2011. History of Cannabis Use and Anti-Marijuana Laws in Thailand.
- BRADFORD, A. C. & BRADFORD, W. D. 2016. Medical marijuana laws reduce prescription medication use in Medicare Part D. *Health Affairs*, 35, 1230-1236.
- COHEN, J. 2004. Thailand. Not enough graves: the war on drugs, HIV/AIDS, and violations of human rights. *Human Rights Watch*, 16, 1-58.

- COSTS, C. T. 2013. The War on Drugs: Wasting Billions and Undermining Economies. *Count the Costs*.
- EGELKO, B. 2011. Is Obama Changing his Tune on Marijuana?
- FORBES 2018. Thailand's Legalization Of Medical Cannabis Proves One Very Important.
- FORUM, T. L. 2001. TREATY OF AMITY AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND THE UNITED STATES OF AMERICA".
- GALL, J. A. & PAYNE-JAMES, J. 2016. *Current practice in forensic medicine*, John Wiley & Sons.
- GERBER, R. J. 2004. *Legalizing marijuana: Drug policy reform and prohibition politics*, Greenwood Publishing Group.
- GRINSPOON, L. G., GRINSPOON, L. & BAKALAR, J. B. 1997. *Marihuana, the forbidden medicine*, Yale University Press.
- GROTENHERMEN, F. & RUSSO, E. 2002. *Cannabis and cannabinoids: pharmacology, toxicology, and therapeutic potential*, Psychology Press.
- GUSOVSKY, D. 2016. Americans consume vast majority of the world's opioids.
- III, C. L. 2019. Is The Philippines Ready To Legalize Marijuana?
- KANATO, M., LEYATIKUL, P., CHOOMWATTANA, C. & THEPWONGSA, I. 2017. *ASEAN drug monitoring report 2015*, ASEAN Narcotics Cooperation Center.
- LEVIN, S. 2016. Exports: medical marijuana draws parents to US for their children's treatments.
- LIOTTA, E. 2019. Thai Government to Discuss Allowing Weed to Be Grown at Home.
- MAGUIRE, P. 2018. Thailand's Legendary Marijuana.
- MCCAFFREY, B. R. 1996. The Opium Kings.
- MORRISON, W. M. Thailand-US economic relations: an overview. 2003. Congressional Research Service [Library of Congress].
- MOSHER, C. J. & AKINS, S. 2007. *Drugs and drug policy: The control of consciousness alteration*, Sage.
- MOSHER, C. J. & ATKINS, S. 2019. *In the Weeds: Demonization, Legalization, and the Evolution of US Marijuana Policy*, Temple University Press.
- NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, E., AND MEDICINE (NASEM) 2017. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research.
- NETWORK, D. M. 2013. ASEAN.
- NEWS, M. 2019. Singapore allows first use of medical marijuana to treat girl with epilepsy.
- NUECHTERLEIN, D. E. 1976. National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *Review of International Studies*, 2, 246-266.
- PAKPAHAN, S. & SIREGAR, R. E. 2014. *Upaya Thailand dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-free ASEAN 2015*. Riau University.
- PARTNERS, P. 2019. THE CANNABIS TRENDS THAT SHAPED 2019.
- PHONGPAICHIT, P. Drug policy in Thailand. Proceedings of the 2003 Lisbon International Symposium on Global Drug Policy, 23–25 October 2003, 2003.
- POST, B. 2018. *Farmers giddy over new medical marijuana law* [Online]. Available: <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1601162/farmers-giddy-over-new-medical-marijuana-law> [Accessed].
- QUINLEY, C. 2018. Rencana Thailand Melegalkan Mariyuana Medis Bisa Berdampak ke Asia Tenggara.
- ROBERTS, M., TRACE, M. & KLEIN, A. 2004. Thailand's 'war on drugs'. *Beckley Foundation Drug Policy Programme, Briefing Paper*, 5.
- ROLLES, S. & MURKIN, G. 2013. How to regulate cannabis: a practical guide. *Transform Drug Policy Foundation*. <http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabispractical-guide>.
- RONIS, S. R. 2011. *Economic Security Neglected Dimension of National Security?*, Smashbooks.
- SHI, Y. 2017. Medical Marijuana Policies and Hospitalizations Related to Marijuana and Opioid Pain Reliever.
- SOCIETY, A. C. 2017. Cancer Treatment and Survivorship: Facts and Figures, 2016–2017.
- STATE, U. S. D. O. 2003. Available: <https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/fs/18533.htm> [Accessed].
- SYAODIH, N. 2007. Sukmadinata.(2006). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- UNODC 2015. Drug Trafficking in Southeast Asia is a Growing Concern for Other Countries and Regions.
- VICE 2019. The Battle for Legal Medical Marijuana Hits Malaysia.
- WAGENER, M. 2009. Reliable Kingdom? The USA, Thailand, and the Logic of Bandwagoning. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 28, 39-80.
- WATCH, H. R. 2004. IV. Human Rights Abuses and the War on Drugs.
- WATCH, H. R. 2008. Thailand's 'war on drugs'.
- WORRACHADDEJCHAI, D. K., NARUMON 2019. New tourism minister sees lure of marijuana.